



**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA
BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB MENDAHULUI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Besaran dan Mekanisme Penatausahaan Belanja Bersifat Mengikat dan Belanja Bersifat Wajib Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian kode program dan kegiatan serta untuk mengakomodir keperluan belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib yang belum tertampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 39 tahun 2015 tentang Besaran dan Mekanisme Penatausahaan Belanja Bersifat Mengikat dan Belanja Bersifat Wajib Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Besaran dan Mekanisme Penatausahaan Belanja Bersifat Mengikat dan Belanja Bersifat Wajib Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Besaran dan Mekanisme Penatausahaan Belanja Bersifat Mengikat dan Belanja Bersifat Wajib Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:

1. **Lampiran I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Lampiran I dimaksud secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b kode program 15 yakni Program Obat dan Perbekalan Kesehatan diubah menjadi kode program 16 yakni Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan ditambah dengan kode program 26 yaitu Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata, serta penyebutan kode program 26 kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit pada Unit Organisasi 1.02.02.01 Rumah Sakit Umum dalam Lampiran III Pasal 3 ayat (2) diubah menjadi kode program 16 kegiatan Pelayanan Asuransi Kesehatan sehingga Pasal 3 dimaksud secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Kriteria belanja yang bersifat wajib meliputi :

- a. Pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib pendidikan pada kode program 01 yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- b. Pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib kesehatan pada kode program 16 yaitu Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan kode program 26 yaitu Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.
- c. Pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib lingkungan hidup pada kode program 15 yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

(2) Kriteria...

- (2) Kriteria belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal *9 Februari 2016*



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal *10 Februari 2016*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR **03**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR
TENTANG

: TAHUN 2016
: BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN
BELANJA BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA
BERSIFAT WAJIB MENDAHULUI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KARO TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI BELANJA MENGIKAT GAJI TUNJANGAN, TKD DAN BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH TAHUN 2016

NO.	SKPD	GAJI DAN TUNJANGAN	PAGU ANGGARAN				ALOKASI BELANJA MENGIKAT TAHUN 2016 UNTUK 2 TRIWULAN
			TAMBAHAN PENGHASILAN		BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH	
			BERD. BEBAN KERJA	BERD. TEMPAT KERJA			
1	DINAS PENDIDIKAN	317,044,708,218	140,782,646,000.00	1,500,000,000.00	0.00	459,327,354,218.00	229,663,677,109.00
2	DINAS KESEHATAN	64,931,943,611	3,735,828,772.00	350,000,000.00	0.00	69,017,772,383.00	34,508,886,191.50
3	RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE	18,888,079,106	2,508,300,000.00		0.00	21,396,379,106.00	10,698,189,553.00
4	AKADEMI KEBIDANAN	2,096,677,325	166,800,000.00		0.00	2,263,477,325.00	1,131,738,662.50
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	4,520,154,025	550,788,070.00		0.00	5,070,942,095.00	2,535,471,047.50
6	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	2,898,953,399	612,000,000.00		0.00	3,510,953,399.00	1,755,476,699.50
7	DINAS PERHUBUNGAN	3,273,849,656	419,400,000.00		0.00	3,693,249,656.00	1,846,624,828.00
8	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	2,651,927,743	357,000,000.00		0.00	3,008,927,743.00	1,504,463,871.50
9	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	952,315,524	96,000,000.00		0.00	1,048,315,524.00	524,157,762.00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	2,195,303,071	353,700,000.00		0.00	2,549,003,071.00	1,274,501,535.50
11	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	4,537,822,313	490,200,000.00		0.00	5,028,022,313.00	2,514,011,156.50
12	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	3,142,255,320	354,900,000.00		0.00	3,497,155,320.00	1,748,577,660.00
13	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,071,001,264	405,600,000.00		0.00	3,476,601,264.00	1,738,300,632.00
14	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3,012,153,042	389,700,000.00		0.00	3,401,853,042.00	1,700,926,521.00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2,494,597,549	317,700,000.00		0.00	2,812,297,549.00	1,406,148,774.50
16	DINAS KESBANG DAN LINMAS	4,180,770,479	523,054,364.00		0.00	4,703,824,843.00	2,351,912,421.50
17	KANTOR SATPOL PP	943,171,719	116,400,000.00		0.00	1,059,571,719.00	529,785,859.50
18	DPRD	4,876,831,500			1,764,000,000.00	6,640,831,500.00	3,320,415,750.00
19	KDH DAN WKDH	577,091,204			400,000,000.00	977,091,204.00	488,545,602.00
20	SEKRETARIAT DAERAH	9,620,950,645	1,539,524,000.00		0.00	11,160,474,645.00	5,580,237,322.50
21	SEKRETARIAT DPRD	1,910,689,370	359,400,000.00		0.00	2,270,089,370.00	1,135,044,685.00
22	INSPEKTORAT KABUPATEN	2,540,054,095	463,270,000.00		0.00	3,003,324,095.00	1,501,662,047.50
23	DINAS PENDAPATAN DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8,791,639,609	1,590,000,000.00		0.00	10,381,639,609.00	5,190,819,804.50
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN	2,351,841,667	357,600,000.00		0.00	2,709,441,667.00	1,354,720,833.50
25	KECAMATAN KABANJAHE	3,525,217,636	383,800,000.00		0.00	3,909,017,636.00	1,954,508,818.00

NO.	SKPD	GAI DAN TUNJANGAN	PAGU ANGGARAN				ALOKASI BELANJA MENGIKAT TAHUN 2016 UNTUK 2 TRIWULAN
			TAMBAHAN PENGHASILAN		BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH	
			BERD. BEBAN KERJA	BERD. TEMPAT KERJA			
26	KECAMATAN BERASTAGI	4,106,023,402	387,000,000.00		0.00	4,493,023,402.00	2,246,511,701.00
27	KECAMATAN SIMP.EMPAT	1,914,740,577	197,920,000.00		0.00	2,112,660,577.00	1,056,330,288.50
28	KECAMATAN PAYUNG	1,169,022,154	146,100,000.00		0.00	1,315,122,154.00	657,561,077.00
29	KECAMATAN TIGANDERKET	1,703,410,673	176,800,000.00		0.00	1,880,210,673.00	940,105,336.50
30	KECAMATAN MUNTE	1,437,862,520	162,000,000.00		0.00	1,599,862,520.00	799,931,260.00
31	KECAMATAN TIGABINANGA	1,904,570,948	196,569,453.00		0.00	2,101,140,401.00	1,050,570,200.50
32	KECAMATAN JUHAR	1,695,634,705	181,200,000.00	88,200,000.00	0.00	1,965,034,705.00	982,517,352.50
33	KECAMATAN LAUBALENG	1,473,681,696	150,600,000.00	58,200,000.00	0.00	1,682,481,696.00	841,240,848.00
34	KECAMATAN BARUSIAHE	1,390,172,504	180,000,000.00		0.00	1,570,172,504.00	785,086,252.00
35	KECAMATAN TIGAPANAH	2,454,026,575	217,200,000.00		0.00	2,671,226,575.00	1,335,613,287.50
36	KECAMATAN KUTABULUH	1,627,633,166	146,400,000.00	75,000,000.00	0.00	1,849,033,166.00	924,516,583.00
37	KECAMATAN MEREK	1,856,186,360	182,100,000.00		0.00	2,038,286,360.00	1,019,143,180.00
38	KECAMATAN MARDINDING	1,274,718,008	141,000,000.00	49,800,000.00	0.00	1,465,518,008.00	732,759,004.00
39	KECAMATAN MERDEKA	1,351,307,801	150,600,000.00		0.00	1,501,907,801.00	750,953,900.50
40	KECAMATAN NAMAN TERAN	1,404,329,303	162,000,000.00		0.00	1,566,329,303.00	783,164,651.50
41	KECAMATAN DOLAT RAYAT	1,273,906,018	145,800,000.00		0.00	1,419,706,018.00	709,853,009.00
42	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	1,066,869,261	127,800,000.00		0.00	1,194,669,261.00	597,334,630.50
43	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEM. DESA	2,323,060,951	298,600,000.00		0.00	2,621,660,951.00	1,310,830,475.50
44	KANTOR KEARSIPAN, PERPUSTAKAAN, DOKUMEN	842,659,927	108,000,000.00		0.00	950,659,927.00	475,329,963.50
45	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PDE	3,663,904,067	479,700,000.00	16,800,000.00	0.00	4,160,404,067.00	2,080,202,033.50
46	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	5,027,163,276	620,400,000.00	16,800,000.00	0.00	5,664,363,276.00	2,832,181,638.00
47	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	2,860,056,419	372,600,000.00		0.00	3,232,656,419.00	1,616,328,209.50
48	BADAN PENYULUHAN PERTANIAN	6,146,488,765	680,100,000.00		0.00	6,826,588,765.00	3,413,294,382.50
49	KANTOR KETAHANAN PANGAN	1,064,463,943	115,200,000.00		0.00	1,179,663,943.00	589,831,971.50
50	DINAS KEHUTANAN	4,822,126,446	470,000,000.00		0.00	5,292,126,446.00	2,646,063,223.00
51	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1,651,698,558	262,200,000.00		0.00	1,913,898,558.00	956,949,279.00
52	BPBD	1,719,385,341.00	317,100,000.00		0.00	2,036,485,341.00	1,018,242,670.50
	JUMLAH	532,535,717,113.00	163,331,500,659.00	2,154,800,000.00	2,164,000,000.00	700,186,017,772.00	350,093,008,886.00


BUPATI KARO
TERKELOM BKAHMANA

URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI

: 1.2 Urusan Wajib Kesehatan
: 1.02.02.01 Rumah Sakit Umum

ALOKASI BELANJA WAJIB BELANJA LANGSUNG TAHUN 2016

NO	Kode Rekening				Uraian	Pagu Anggaran	Pengeluaran Maksimal 1 bulan	Alokasi Belanja 2 Triwulan	Keterangan
	1	2	3	4					
1	16	18	5	2	Pelayanan Asuransi Kesehatan	12,054,773,000	1,004,564,417	6,027,386,500	
					Belanja barang dan jasa	12,054,773,000	1,004,564,417	6,027,386,500	
				01	Belanja Bahan Habis Pakai	100,000,000	8,333,333	50,000,000	
				06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100,000,000	8,333,333	50,000,000	
				02	Belanja bahan/material	11,294,773,000	941,231,083	5,647,386,500	
				04	Belanja bahan obat-obatan	10,522,383,520	876,865,293	5,261,191,760	
				05	Belanja Bahan Kimia	772,389,480	64,365,790	386,194,740	
				11	Belanja Makanan dan Minuman	660,000,000	55,000,000	330,000,000	
				03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	660,000,000	55,000,000	330,000,000	
2	26	23	5	2	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	273,500,000	22,791,667	136,750,000	
					Belanja barang dan jasa	273,500,000	22,791,667	136,750,000	
				01	Belanja bahan pakai habis	31,500,000	2,625,000	15,750,000	
				08	Belanja Pengisian Tabung Gas	31,500,000	2,625,000	15,750,000	
				02	Belanja Bahan/Material	50,000,000	4,166,667	25,000,000	
				05	Belanja Bahan Kimia	50,000,000	4,166,667	25,000,000	
				11	Belanja Makanan dan Minuman	192,000,000	16,000,000	96,000,000	
				03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	192,000,000	16,000,000	96,000,000	
					JUMLAH	12,328,273,000	1,027,356,083	6,164,136,500	

BUPATI KARO
TERKELIN BRAHMANA

ALOKASI BELANJA WAJIB BELANJA LANGSUNG TAHUN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
UNIT ORGANISASI : 1.08.01.01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

NO	Kode Rekening			Uraian	Pagu Anggaran	Pengeluaran Maksimal 1 bulan	Alokasi Belanja 2 Triwulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7		
1	15	04		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	1,715,537,100	142,961,425	857,768,550	
		5	2	Belanja Barang dan Jasa	1,715,537,100	142,961,425	857,768,550	
			2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,715,537,100	142,961,425	857,768,550	
				Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		142,961,425	857,768,550	
2	15	08		Kerjasama Pengelolaan Sampah	4,473,435,870	372,786,323	2,236,717,935	
		5	2	Belanja pegawai	4,473,435,870	372,786,323	2,236,717,935	
			1	Honorarium Non PNS	4,429,595,870	369,132,989	2,214,797,935	
			02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4,429,595,870	369,132,989	2,214,797,935	
		5	2	Belanja Barang dan Jasa	43,840,000	3,653,333	21,920,000	
			01	Belanja Bahan Pakai Habis	43,840,000	3,653,333	21,920,000	
				Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43,840,000	3,653,333	21,920,000	
				JUMLAH	6,188,972,970	515,747,748	3,094,486,485	

BUPATI KARO
TERKELTN BRAHMANA